

NEGARA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN

Studi Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto di Kab. Ponorogo



Oleh:

Farhad Najib Izzuddin

NIM. 20200012053

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Master of Arts dalam Interdisiplinary Islamic Studies**

Program Interdisipliner Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-864/Un.02/DPPs/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : Negara Dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan (Studi Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto di Kab.Ponorogo)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAD NAJIB IZZUDDIN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012053
Telah diujikan pada : Rabu, 10 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 66b95b065961a



Penguji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 66a83d7086f4b



Penguji III

Prof. Dr. Aziz Muslim, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 66d191f312798



Yogyakarta, 10 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66d918165bebd

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**" NEGARA DAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN
Studi Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto di Kab.Ponorogo"**

Yang ditulis oleh:

Nama : Farhan Najib Izzuddin
NIM : 20200012053
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A.)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 197112072009011003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhad Najib Izzuddin, S. H
NIM : 20200012053
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 10 Juni 2024
Saya yang menyatakan,



Farhad Najib Izzuddin, S.H
NIM. 20200012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhad Najib Izzuddin, S. H
NIM : 20200012053
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Farhad Najib Izzuddin, S.H
NIM. 20200012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Farhad Najib Izzuddin. Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik. Negara dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan: Studi Pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto di Kabupaten Ponorogo. Tesis. Program Magister Kajian Islam Interdisipliner Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.2024.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan studi pembangunan Face Off Jalan HOS Cokroaminoto di Kabupaten Ponorogo melalui ekonomi kerakyatan. Pembangunan ini diinisiasi sebagai bagian dari program 99 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo yang baru dilantik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan perubahan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori analisis kebijakan publik, ruang publik (Jurgen Habermas), dan ekonomi kerakyatan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan membuka peluang usaha baru. Implementasi kebijakan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi kemasyarakatan, stakeholder, dan paguyuban pedagang kaki lima (PKL). Pembangunan ini juga berkontribusi pada penataan ruang kota yang lebih rapi dan indah, serta meningkatkan daya tarik pariwisata Ponorogo dan memberikan dampak positif terhadap ekonomi kerakyatan gotong-royong segala elemen dari pemerintahan dan swasta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Ponorogo, serta menunjukkan pentingnya partisipasi berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan Implementasi kebijakan dengan menggandeng pihak-pihak terkait seperti organisasi kemasyarakatan, para stakeholder hingga paguyuban pedagang kaki lima (PKL) Mekar Sore untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam program *Face Off* Jalan H.O.S Cokroaminoto.

Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto juga berkontribusi pada penataan ruang kota yang lebih rapi dan indah. Dengan mengadopsi konsep ruang publik yang inklusif, pembangunan ini berhasil menciptakan kawasan yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat perdagangan tetapi juga sebagai destinasi wisata kota. Hal ini meningkatkan daya tarik pariwisata Ponorogo dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang direncanakan dengan baik dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dapat memberikan dampak positif yang luas. Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto menjadi contoh konkret bagaimana kebijakan publik yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi target penyelesaian secara holistik agar hasil yang dicapai bisa dirasakan secara menyeluruh di setiap lapisan elemen masyarakat daerah Kabupaten Ponorogo.

Kata Kunci: *Face Off, Kebijakan Publik, Ruang Publik dan Ekonomi Kerakyatan.*

ABSTRACT

Farhad Najib Izzuddin. *Islam, Development and Public Policy. State and People's Economic Development: Study of the Construction of the H.O.S Cokroaminoto Road in Ponorogo Regency. Thesis. Master's Program in Interdisciplinary Islamic Studies, Sunan Kalijaga State Islamic University, Yogyakarta. 2024.*

This research aims to analyze the policy design for the Face Off development study on Jalan HOS Cokroaminoto in Ponorogo Regency through people's economics. This development was initiated as part of the 99 working day program for the newly appointed Regent and Deputy Regent of Ponorogo, with the aim of improving community welfare through economic growth, improving the quality of life and social change. This research uses a theoretical approach to analyzing public policy, public space (Jurgen Habermas), and people's economics. The research method used is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and literature study.

The research results show that the construction of Jalan HOS Cokroaminoto has succeeded in increasing people's income, creating new jobs and opening up new business opportunities. Policy implementation is carried out by involving various parties, including community organizations, stakeholders, and street vendor associations (PKL). This development also contributes to a neater and more beautiful urban spatial planning, as well as increasing the tourist attraction of Ponorogo and providing a positive impact on the people's economy, working together with all elements of government and the private sector to achieve the welfare of the people of Ponorogo, as well as showing the importance of participation of various elements of society in development process Implementation of policies by collaborating with related parties such as community organizations, stakeholders and the Mekar Sore street vendors (PKL) association to support and participate in the Jalan H.O.S Cokroaminoto Face Off program.

The construction of Jalan HOS Cokroaminoto also contributes to a tidier and more beautiful urban spatial planning. By adopting an inclusive public space concept, this development has succeeded in creating an area that not only functions as a trade center but also as a city tourist destination. This increases Ponorogo's tourism attractiveness and provides long-term benefits for the welfare of the local community. Overall, this research confirms that infrastructure development that is well planned and involves active community participation can have a broad positive impact. The construction of Jalan HOS Cokroaminoto is a concrete example of how appropriate public policy can improve people's quality of life and encourage sustainable economic growth. This success shows the importance of collaboration between government and society in achieving inclusive and sustainable development goals. This is a holistic resolution target so that the results achieved can be felt as a whole at every level of society in the Ponorogo Regency area.

Keywords: *Face Off, Public Policy, Public Space and Community Economy*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul *“Negara dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; Studi Pembangunan Jalan HOS Cokroaminoto di Kabupaten Ponorogo”* Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-Nya.

Penyusunan tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar magister studi Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam proses penyusunan tesis ini, terdapat berbagai kendala dan hambatan sehingga penulis menyadari bahwa dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini tidak dapat lepas dari bantuan, dorongan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang selama ini mendukung proses penelitian dan penyusunan tesis ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada seluruh mahasiswa.
2. Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan berbagai motivasi dan dorongan kepada mahasiswa pascasarjana.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mendukung dan membantu para mahasiswa dalam proses

pembelajaran.

4. Bapak Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam perkuliahan.
5. Ahmad Norma Permata, Ph.D selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Teman-teman seperantauan dan seperjuangan akademik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) angkatan 2020 semester genap yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini selama berlangsungnya proses perkuliahan di kampus.
7. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Tesis ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna dan baik dari segi penulisan maupun analisisnya. Oleh karena itu, terbukanya kritik dan saran guna penyempurnaan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 09 Juni 2024

Penulis,



Farhad Najib Izzuddin

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, tauladan yang luar biasa hebat. Selalu mendo'akan, serta

memberikan dukungan kepada anak-anaknya;

Ayahanda Abdul Aziz & Ibunda Darmi.

Istriku; Alfiana Yuniar Rahmawati,

yang tiada hentinya membersamai penulis baik suka maupun duka

dengan penuh kasih sayang.

Almamater Tercinta

Program Pascasarjana

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO

"Banyak orang berpikir bahwa sukses adalah tempat tujuan. Bagaimana kalau mulai hari ini kesuksesan hanya sebuah tiket ? Tujuan kita adalah memberi kebaikan dan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin orang, menjadi sebaik-baik manusia."

-Fahd Pahdepie, dalam buku "*Muda Berdaya KaryaRaya!*"



| | |
|-----------------------------------|-------------|
| NOTA DINAS PEMBIMBING..... | 3 |
| ABSTRAK..... | VI |
| KATA PENGANTAR..... | VIII |
| PERSEMBAHAN..... | 10 |
| MOTTO..... | 11 |
| DAFTAR ISI..... | 12 |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG MASALAH | 1 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 10 |
| C. TUJUAN DAN SIGNIFIKASI | 10 |
| D. KAJIAN PUSTAKA | 11 |
| E. KERANGKA TEORITIS | 16 |
| F. METODE PENELITIAN | 21 |
| G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN | 26 |
| BAB V PENUTUP..... | 28 |
| A. KESIMPULAN | 28 |
| B. SARAN..... | 29 |
| DAFTAR PUSTAKA | 30 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan pada awalnya dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan perubahan sosial. Ini melibatkan berbagai aspek, termasuk peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemakmuran ekonomi.

Pembangunan juga sering dikaitkan dengan kemajuan sosial dan modernisasi. Ini mencakup perubahan sosial yang membawa masyarakat menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Istilah pembangunan sering digunakan dalam berbagai konteks politik dan ideologi, menunjukkan pentingnya perubahan struktural dan institusional dalam mencapai tujuan pembangunan. Secara keseluruhan, pembangunan adalah konsep multidimensi yang melibatkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.¹

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai tahapan dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan Ekonomi Kerakyatan. Pada awal kemerdekaannya, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang baru merdeka, termasuk mengatasi bekas penjajahan, konflik internal, dan perekonomian yang lemah. Namun, melalui berbagai kebijakan pembangunan dan reformasi, Indonesia berhasil mencapai kemajuan yang signifikan. Antara tahun 1960-an hingga 1990-an, pemerintah menerapkan berbagai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk

¹ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insit Press, 2006), hlm 13

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, seperti program pertanian, industri, dan infrastruktur. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, termasuk krisis ekonomi dan konflik politik, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dan mengalami kemajuan sosial yang signifikan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan.

Sejak tahun 2000-an, Indonesia telah melanjutkan upaya pembangunan melalui berbagai program reformasi struktural, peningkatan investasi dalam pendidikan dan kesehatan, serta promosi pembangunan infrastruktur. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kesenjangan ekonomi yang besar, isu lingkungan, dan ketimpangan sosial, Indonesia terus berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, menuju visi sebagai negara maju dan sejahtera.²

Selama masa Orde Baru di Indonesia (1966-1998), pemerintahan Suharto menerapkan berbagai program pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi dengan program Pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu periode jangka panjang 25 tahun dan periode jangka pendek 5 tahun yang dikenal dengan REPELITA, stabilitas politik, dan modernisasi sosial. Program-program tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor industri, peningkatan pertanian, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program transmigrasi. Meskipun berhasil dalam beberapa aspek, masa Orde Baru juga diwarnai oleh otoritarianisme politik, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.

Bahwa nilai dasar yang melandasi strategi pembangunan adalah mencakup prinsip-prinsip seperti keadilan, keberlanjutan, partisipasi, dan keseimbangan

² Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim, *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2012), hlm 47-48

antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Ini berarti pembangunan harus memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang berkelanjutan juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang, serta memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara bijaksana. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting, karena melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.³

Pada era selanjutnya Pasca reformasi di Indonesia sejak tahun 1998 telah ditandai oleh perubahan besar dalam berbagai bidang pembangunan. Demokratisasi mengalami kemajuan signifikan, dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil serta peningkatan kebebasan berpendapat. Di sisi ekonomi, reformasi dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan peningkatan layanan publik. Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun terdapat kemajuan, tantangan seperti kesenjangan ekonomi dan tantangan lingkungan masih menjadi fokus bagi pembangunan masa depan Indonesia.⁴

Diberi kewenangan dalam mengatur suatu wilayah, pemerintahan dan delegasi kekuasaan. Melalui Asas desentralisasi, prinsip yang menekankan pentingnya delegasi kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau lokal. Dengan menerapkan asas ini, keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan dapat diambil lebih dekat

³ Tjokroamidjojo, *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*, (Jakarta: LP3ES,1993), hlm 68

⁴ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: CIDES,1996), hlm 133

dengan masyarakat yang terkena dampaknya. Hal ini memungkinkan adanya respons yang lebih cepat dan lebih tepat terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Prinsip desentralisasi juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan mempromosikan keterlibatan aktif mereka dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.⁵

Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah di Indonesia. Salah satu poin penting dalam UU ini adalah proses pemilihan kepala daerah (pilkada). Undang-undang ini mendasarkan pelaksanaan pilkada pada prinsip demokrasi, partisipatif, dan transparan. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini termasuk mekanisme pencalonan, tahapan pilkada, syarat calon, penentuan pemenang, dan sanksi bagi pelanggaran. UU ini memberikan wewenang kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pilkada. Selain itu, UU ini juga memberikan hak kepada masyarakat untuk mengawasi dan mengawal proses pemilihan kepala daerah secara langsung, sesuai dengan prinsip desentralisasi dan demokrasi yang dipegang teguh oleh negara.⁶ Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan sebuah agenda pembangunan bisa berfokus pada pelaksanaan visi tentang masa depan daerah dalam proses kebijakan lokal.⁷

Regulasi dan kebijakan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan KPU, peraturan Kemendagri, peraturan daerah, serta kebijakan

⁵ Armand dan Sandi Prahara, *Analisis Pemerintah Daerah*, (Gorontalo: Cahaya Arsh Publisher, 2021), hlm 56

⁶ Azis Setyagama, *Pembaruan Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2017), hlm 85

⁷ Mahadiansar dkk, *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional di Indonesia*, Jurnal Ilmu Administrasi, Vol 17 No. 1, 2020

pengawasan dan penegakan hukum dari lembaga seperti Bawaslu. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan pilkada berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta menjamin hak politik masyarakat untuk memilih pemimpin mereka secara bebas dan adil. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kontrak politik menjadi bagian penting dalam proses menentukan pemimpin politik.⁸

Kontrak politik antara rakyat sebagai pemilih dan calon kepala daerah merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan demokrasi lokal sebagai upaya dalam memecahkan permasalahan yang ada. Kontrak politik merujuk pada kesepakatan informal atau formal antara pemerintah dan rakyat, yang mencakup kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam menjalankan tugas-tugas politik dan sosial. Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia, kontrak politik dapat mencakup janji-janji kampanye yang diberikan oleh calon kepala daerah kepada pemilih, serta harapan-harapan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintah daerah yang terpilih. Kontrak politik ini memainkan peran penting dalam menentukan dukungan masyarakat terhadap calon, serta dalam memantau kinerja pemerintah daerah setelah terpilih. Keberhasilan dalam memenuhi janji-janji kampanye dan kinerja yang baik dapat menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, sementara kegagalan dapat menyebabkan kekecewaan dan penurunan dukungan.⁹ Pasca kepala daerah terpilih segera menerapkan program dan agenda kebijakan birokrasi di tingkat pemerintahan daerahnya untuk terus berinovasi, mampu memberikan

⁸ Siti Aminah, *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*, (Jakarta: Kencana 2016), hlm 239

⁹ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintahan*, hlm 1

pelayanan yang baik serta diproyeksikan dapat meningkatkan percepatan pembangunan daerah.¹⁰

Salah satu visi-misi dari salahsatu paslon menawarkan program dengan skema ekonomi kerakyatan implemenntasi dari kontrak politik dalam program dan agenda inovasi kebijakan pembangunan di Kabupaten Ponorogo setelah terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati dalam Pilkada Serentak pada tahun 2020 lalu. Kebijakan pembangunan muncul setelah Bupati dan Wakil Bupati baru saja di lantik pada Februari 2021. Kebijakan pembangunan sebagai tonggak dasar pelaksanaan Progam 99 (sembilan puluh sembilan) hari, Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo menciptakan pembangunan *face off* pedestrian jalan H.O.S Cokroaminoto sebagai wisata kota sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Jalan H.O.S Cokroaminoto merupakan jalur utama dengan panjang sekitar 700 meter yang terletak di tengah kota.¹¹

Salah satu upaya dari salah satu Calon Bupati dan Calon wakil Bupati untuk meningkatkan daya saing di masa pemilihan menawarkan sebuah program *City branding* Kota Ponorogo Sebagai salah satu strategi untuk daerah, kota ataupun kabupaten supaya dapat dikenal secara luas diseluruh dunia, untuk mewujudkan hal tersebut suatu wilayah akan menonjolkan identitas dan karakter yang dimilikinya sehingga akan menciptakan keunggulan komparatif. Selain itu, *city branding* juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk memberikan *merk* kepada kota agar mudah dikenali dan dapat membentuk *city image* untuk memasarkan daerah baik secara lokal maupun internasional.

Kemudian Bupati terpilih menawarkan sebuah program *City branding*

¹⁰ Fathur Rahman dan Janwan S.R Tarigan, *Inovasi Pemerintahan : Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Ideal*, (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm 3

¹¹ <https://ponorogo.go.id/2021/03/05/bupati-sugiri-sosialisasikan-face-off-jalan-hos-cokroaminoto/> diakses pada Februari 2023

dengan membangun Face Off di Jalan H.O.S Cokroaminoto menjadi suatu perangkat pembangunan ekonomi perkotaan yang digunakan untuk memperebutkan sumber daya ekonomi di tingkat lokal, regional, nasional dan global. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat diketahui bahwa *city branding* merupakan strategi yang dipakai untuk menjadikan sebuah wilayah agar memiliki suatu identitas tersendiri yang mudah dikenali, yang mana adanya identitas tersebut digunakan untuk memasarkan kota pada konsumen ataupun memasarkan kota pada tingkat lokal ataupun internasional sehingga dengan adanya kota yang dikenal oleh khalayak umum bisa berdampak pada kegiatan ekonomi suatu kota.

Upaya city branding Ponorogo ini melalui proses perencanaan diantaranya penetapan tujuan, kajian terkait potensi Ponorogo yang kemudian menghasilkan logo dan tagline "*Ethnic Art of Java*", mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan destinasi wisata. City Branding Ponorogo berdampak terhadap kualitas pariwisata dan kuantitas kunjungan wisatawan namun dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala dari dalam dan luar organisasi. City branding Ponorogo telah menghasilkan trend peningkatan baik dari segi kualitas pariwisata (kualitas dan mutu seni budaya yang ditampilkan) maupun kuantitas pengunjung.

Hal ini disebabkan karena geliat kegiatan-kegiatan yang dirangkum dan dilaksanakan dalam rangka branding Kabupaten Ponorogo. Jumlah kunjungan wisatawan di Ponorogo dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan ke Ponorogo mencapai 249.294 pengunjung. Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan mencapai angka 345.818 pengunjung.

Sengaja dipilih jalan HOS Cokroaminoto untuk lokasi face off, sebab pahlawan nasional ini lahir di Ponorogo. Dari didikan HOS Cokroaminoto itulah

lahir tokoh-tokoh nasional. Dengan face off-nya jalan HOS Cokroaminoto ini, sumbu ekonomi di Ponorogo ini akan hidup. Sebab, di masa pandemi Covid-19 ini, harus ada inisiatif. Tidak hanya untuk bertahan tetapi juga bangkit, sehingga ekonomi bisa bangkit. Selain itu, tata kota ini harus bagus. Jika kota tertata rapi, maka masyarakat akan percaya. “Jadi di masa pandemi ini, selain harus bertahan, ekonomi juga harus bangkit. Face off jalan HOS Cokroaminoto mengawali sumbu ekonomi akan hidup,” face off jalan HOS Cokroaminoto. Dalam pembangunan face off, pihaknya menggelontorkan tak kurang dari Rp 270 juta. Dana tersebut untuk dari beberapa organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nu untuk pelebaran trotoar, penyediaan kursi taman dan pemasangan lampu hias. “Sejak awal kami dukung face off ini, untuk membuat wajah Ponorogo lebih cantik.

Langkah pertama dalam mengimplementasikan kebijakan dilakukan melalui proses sosialisasi kepada para pemilik toko, kepala instansi terkait, tokoh organisasi masyarakat, serta pedagang kaki lima. Program inovasi yang didifusikan dalam sosialisasi kepada masyarakat mengalami kemungkinan untuk diterima atau ditolak karena pembangunan dilakukan dalam bentuk partisipatoris. Diterimanya suatu inovasi apabila masyarakat memperoleh nilai kemanfaatan, kelayakan, dan konsekuensi-konsekuensi yang diharapkan. Dalam kondisi yang lain, masyarakat menolak suatu kebijakan tanpa adanya alasan yang nyata. Namun bupati dan wakil bupati Kabupaten Ponorogo berupaya untuk memberikan penjelasan dengan mengajak masyarakat bergotong royong mengubah wajah baru kabupaten Ponorogo menjadi pusat kegiatan ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan.

Proses (*dialectic of control*) sebuah konsep yang berkaitan dengan hubungan antara pemerintah (atau pejabat yang berwenang) dan masyarakat dalam sebuah sistem politik. Konsep ini berasal dari teori politik dan ilmu administrasi

publik. Interaksi dinamis antara pemerintah yang berusaha untuk mengontrol masyarakat dan sebaliknya, di mana masyarakat juga berusaha untuk mengontrol atau mempengaruhi pemerintah. Ini mencerminkan adanya hubungan saling ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

Penerimaan suatu inovasi kebijakan pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto di kabupaten Ponorogo tentunya memerlukan penjelasan dan perubahan persepsi publik. Pemerintah daerah sebagai komunikator kebijakan harus memahami faktor-faktor diterima dan ditolaknya suatu kebijakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah merupakan hasil komunikasi dari seluruh elemen masyarakat Ponorogo. Hadirnya inovasi kebijakan pembangunan jalan ini tidak hanya sebagai solusi melainkan sebuah kekuatan yang mampu mentransformasi pelayanan publik menjadi efektif dan efisien. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa potensi terbaik di daerah Ponorogo mulai diupayakan untuk dapat dikelola secara optimal, baik potensi wisata, Ekonomi Kerakyatan maupun sumber daya manusia demi memperjuangkan kesejahteraan daerah.

Dalam konteks demokrasi, mencerminkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas keputusan dan tindakan mereka, sementara masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memantau, mengevaluasi, dan mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi politik dan mekanisme demokratis lainnya.¹² Praktek implementasi pada proses

¹² Adi Himawan dkk, “Keterlibatan Warga dalam Pembentukan Ruang Publik (Analisa Pembentukan Ruang Publik dalam Revitalisasi Pasar Tradisional di Kota Surakarta)”, Jurnal Analisa Sosiologi Vol 2, No.1, 2013. <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/17380>

menerapkan kebijakan publik yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Ini melibatkan berbagai langkah, mulai dari penetapan regulasi hingga pelaksanaan program-program pemerintah di lapangan. Implementasi kebijakan politik modern sering melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil untuk memastikan efektivitasnya. Ini juga mencakup pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa tujuan politik yang diinginkan tercapai dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, fokus kajian ini menarik untuk dicermati pada proses kontrak politik dan implementasinya Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam proses pembangunan *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto serta dampak yang ditimbulkan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana dampak ekonomi kerakyatan yang ditimbulkan setelah pembangunan *Face Off* jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan dan Signifikasi

Sebuah penelitian tidak akan berarti jika tidak tahu apa yang menjadi tujuan dan manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui desain kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan Jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo berdasar kebijakan bupati yang baru saja dilantik sehingga dalam progam ini belum bisa menggunakan APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) tahun anggaran

2021. Dalam penelitian ini juga diharapkan mampu untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak ekonomi kerakyatan yang ditimbulkan setelah pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo.

Signifikasi Penelitian ini sebagai respon melihat fenomena atas perubahan karakter sebuah kota dengan pembangunan jalan *Face Off* yang secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pembangunan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Indonesia. Sedangkan secara praksis sosial dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo, agar sampai tepat pada sasaran dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat lokal dan daerah.

D. Kajian Pustaka

Sebagai upaya dalam mendapatkan hasil penelitian yang komperhensif, Melakukan pendalaman pada kajian Pustaka (kuhaty) dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai perbandingan dan referensi kajian. Meskipun telah banyak penelitian baik berupa jurnal, tesis, bahkan buku yang membahas tentang tema pembangunan ini, namun sifatnya saling bersinggungan satu dengan yang lainnya.

Pertama, Disertasi yang disusun oleh Nicolaas Evert Kuahaty (2019) judul “*Dampak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Jalan terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Penduduk Kawasan Perdesaan (Studi Kasus di Kawasan Perdesaan Mairasi, Kabupaten Kaiman, Papua Barat)*”. Menganalisis kondisi *output* dan *outcome* sebagai bentuk perubahan sosial ekonomi penduduk sebelum dan sesudah pembangunan infrastruktur jalan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya sebagai *output* kinerja tetapi juga perubahan sosial ekonomi penduduk sebagai *outcome* kebijakan.

Pengembangan infrastruktur jalan juga berimplikasi pada persoalan aksesibilitas penduduk di kawasan Perdesaan Mairasi, Kabupaten Kaimana, Papua Barat.¹³

Kedua, Tesis Rudiansyah (2021) dengan judul “*Konsep Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”. Memberi penjelasan menguraikan konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto yang selanjutnya diperspektifkan berdasarkan konsep ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* latar belakang genealogis konsep ekonomi kerakyatan dari gagasan Bung Hatta, pemikiran Emil Salim, hingga dikembangkan. *Kedua* Eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia dalam meletakkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi basis moral ekonomi sekaligus sebagai orientasi politik ekonomi Indonesia. *Ketiga* Perspektif ekonomi syariah terhadap konsep kepemilikan dan keadilan dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto, memiliki benang merah sebagai kekhasan konsep ekonomi masing-masing.¹⁴

Ketiga, Tesis Jhonson Lagan (2022) dengan judul “*Kebijakan Hukum Pembangunan Infrastruktur Jalan Berkelanjutan Di Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara*”. Bagaimana dinamika menyoroti tentang kebijakan hukum pembangunan infrastruktur jalan serta implementasinya dalam prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara) Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pembangunan infrastruktur jalan berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara telah melewati berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan perbatasan yang berlaku hingga saat ini. Selain itu, implementasi prinsip pembangunan di kawasan

¹³ Nicolas Evert Kuhaty, Disertasi Pascasarjana Progam Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 2019.

¹⁴ Rudiansyah, Tesis: Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.

tersebut sudah sesuai dengan konsepsi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan hukum yang dilakukan bersifat menyeluruh dan diartikan secara luas, sehingga mampu mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan ekologi dengan baik.¹⁵

Keempat, Tesis Zaenuddin (2021) judul “*Konflik dan Pluralitas Aktor Dalam Desain Kebijakan Pembangunan Waduk Lambo Di Kabupaten Nageko, Nusa Tenggara Timur*”. Bagaimana menguraikan tentang rencana pembangunan Waduk Lambo di Kabupaten Nageko yang mengalami penolakan, perlawanan masyarakat adat dan berujung pada terjadinya konflik sosial. Hasil dari penelitian ini menunjukkan model desain kebijakan yang diadopsi oleh Pemerintah Kabupaten Nageko adalah rasional-komprehensif yang cenderung kaku dan tidak fleksibel dalam merespon penolakan dan perlawanan masyarakat setempat.¹⁶

Kelima, artikel Siti Witianti (2016) judul “*Demokrasi dan Pembangunan*”. Peneliti berangapan apakah demokrasi dapat mendukung proses pembangunan atau sebaliknya apakah pembangunan dapat menunjang proses demokratisasi baik di tingkat pusat maupun lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa catatan pembangunan di Indonesia menunjukkan adanya pembangunan di masa sentralistik secara besar-besaran, akan tetapi efeknya tidak dapat dirasakan masyarakat secara merata. Sehingga sistem desentralisasi menjadi pilihan, meningkatkan partisipasi rakyat, lebih memahami kebutuhan, serta mendorong demokratisasi di tingkat lokal.¹⁷

Keenam, artikel Ahmad Sururi (2016) judul “*Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*”. Dalam jurnal tersebut, fokus penelitian

¹⁵ Jhonson Lagan, Tesis: Universitas Borneo Tarakan, 2022.

¹⁶ Zaenuddin, Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

¹⁷ Siti Witianti, “*Demokrasi dan Pembangunan*”, *Jurnal Wacana Politik – Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik*, Vol 1, No.1, Maret 2016:71-76. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547>

menganalisis tentang berbagai penerapan kebijakan publik dari berbagai daerah yang berbasis inovatif dalam perspektif konseptual dan empiris. Secara konseptual penulis menjelaskan bahwa inovasi kebijakan merupakan perubahan paradigma atau cara pandang suatu masalah yang ada, sehingga memunculkan solusi ide, gagasan dan terobosan yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan yang baru. secara empiris, penulis menekankan inovasi kebijakan pada strategi, metode, dan teknik menjadi suatu proses kerja untuk mencapai hasil perubahan kebijakan yang lebih baik, sederhana dan efisien¹⁸

Ketujuh, jurnal Rizky Wibowo dan Dewi Rostyaningsih dengan judul “*Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)*”. Penulis memaparkan tentang permasalahan lahan, berkembangnya pembangunan perumahan dan kaitannya dengan pelaksanaan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini, penulis mengelompokkan menjadi 4 kategori aktor yang berperan dan memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan tata ruang, yaitu: *Key players* terdiri dari Bappeda dan Dinas Tata Kelola Perumahan, *Contest Setter*, Konsultan Jasa, *Subjects*, aktivis lingkungan dan Satpol PP, Kategori pengikut lain, terdiri dari masyarakat, Kelurahan dan Kecamatan. Sehingga dari analisis aktor tersebut perlu adanya kesinambungan koordinasi dan partisipasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Sururi, *Inovasi Kebijakan Publik (Tinjauan Konseptual dan Empiris)*. Jurnal Sawala, 2016. <https://doi.org/10.30656/sawala.v4i3.241>

¹⁹ Rizky Fajar dan Dewi R, “Analisis Aktor Implementasi Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (Studi Kasus di Kecamatan Gunungpati)”, *Jurnal Of Public Policy And Management*. Review Vol.5 No.4, 2016. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/12783>

Kedelapan, Arif Hartono dengan jurnal berjudul “Menelusuri Wacana Pembangunan: Mencari Format Pembangunan Khas Negara Berkembang”. Mendeskripsikan tentang bagaimana pergeseran makna pembangunan, kerangka konseptual pembangunan dunia ketiga, beberapa implementasi model pembangunan serta krisis pembangunan yang terjadi di berbagai negara. Fokus artikel yaitu menyoroti tentang proses pembangunan di negara berkembang. Banyak negara berkembang telah mengadopsi konsep pembangunan dari barat, padahal negara berkembang memiliki kondisi sejarah, Ekonomi Kerakyatan, sosial, politik serta latar belakang yang berbeda. Pada bagian penutup penulis memaparkan perspektif alternatif dengan langkah dekonstruksi praksis pembangunan, pendekatan elektik yaitu tidak mau konsisten mengikuti satu paradigma saja sangat memungkinkan kemunculan konsepsi-konsepsi baru pembangunan yang *autentik* khas negara berkembang.²⁰

Hasil kajian Pustaka dari penelitian terdahulu yang dinilai relevan, sebagai pijakan dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan dan memberikan referensi dari beberapa hasil implementasi kebijakan pembangunan sebagai rangkaian strategi dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Para peneliti mengkaji kebijakan dari berbagai perspektif berdasarkan permasalahan yang berbeda-beda. Seperti pembahasan dalam perspektif ekonomi syariah, inovasi kebijakan publik, wacana pembangunan, serta kategori aktor dalam perencanaan kebijakan rencana tata ruang daerah. Peneliti yang lainnya juga menganalisis tentang konflik dan pluralitas kebijakan pembangunan infrastruktur daerah sebagai studi kasus dengan pendekatan

²⁰ Arif Hartono, “Menelusuri wacana pembangunan: Mencari format pembangunan khas negara berkembang”, *Economic Journal of Emerging Markets*, 4(1), 70–83, 2016. Retrieved from <https://journal.uin.ac.id/JEP/article/view/6865>

kualitatif.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu sebagaimana disebutkan di atas, maka fokus penelitian ini juga mengkaji tentang desain kebijakan yang dirancang oleh Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pokok kajian yang dibahas tidak hanya dalam satu lingkup implementasi kebijakan pembangunan tetapi juga menganalisis dampak yang ditimbulkan sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Selain itu perbedaan subjek dan objek dengan penelitian terdahulu diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang baru dan berbeda baik dalam lingkup desain kebijakan pemerintah maupun upaya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

E. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori dan konsep sebagai cara menganalisis melihat fenomena dan akar masalah untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang muncul, melalui pendekatan sebagai berikut:

1. Analisis Kebijakan Publik

Analisis Kebijakan publik bukanlah suatu hal yang terdengar asing lagi dalam hidup bernegara. Kebijakan publik dapat disebut dengan keputusan dari pemangku kebijakan yang sangat dibutuhkan dalam menjawab berbagai permasalahan kehidupan masyarakat dari berbagai aspek, berbagai kebijakan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat seperti dalam bidang kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, pendidikan, pembangunan ekonomi, kesehatan dan lainnya.²¹

²¹ Harold D. Lasswell, A Preview of Policy Sciences, (New York: American Elsevier Publishing, 1971), hlm 1

Proses membuat suatu kebijakan dan implementasinya, kebijakan tersebut ada yang mencapai *goal* dan sesuai dengan apa yang diharapkan, namun terdapat pula kebijakan yang memang tidak seperti yang diinginkan. Jika mengkaji tentang kebijakan publik, tentunya terdapat berbagai aspek yang dipengaruhi oleh kebijakan publik dikarenakan kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, akan timbul berbagai pertanyaan tentang apa sebenarnya kebijakan publik tersebut terkhusus dalam pembahasan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan yang penulis uraikan.²²

Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin mendeskripsikan tentang bagaimana desain kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan *face off* Jalan H.O.S. Cokroaminoto. Kebijakan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini berdasar pada kebijakan bupati yang baru saja dilantik sehingga dalam progam ini belum bisa menggunakan APBD (Anggaran Pembangunan Belanja Daerah) tahun anggaran 2021. Proses analisis kebijakan terdiri dari tiga langkah utama yaitu perumusan masalah kebijakan, perumusan alternatif kebijakan, dan pemilihan alternatif kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan publik menjadi serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah dalam rangka merespon realitas sosial masyarakat demi tercapainya kemaslahatan dalam arti luas.²³

Kebijakan perspektif Anderson yang dikutip oleh Winarno menyebutkan jika kebijakan sebenarnya dapat digunakan untuk menunjuk perilaku pemangku kebijakan. Kebijakan juga dapat mengidentifikasi siapa saja individu atau

²² William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm 78

²³ La Mani dan Budi Guntoro, *Ekonomi Kerakyatan dan Desain Komunikasi Kebijakan Publik*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hlm 61-62

kelompok dalam suatu agenda tertentu. Kebijakan dalam kacamata ini relatif memadai dan bisa juga dipergunakan dalam keperluan yang tidak bersifat penting. Namun jika menyangkut dalam pembicaraan yang ilmiah dan sistematis terkait dengan kebijakan publik itu sendiri, maka sangat tidak memadai jika menggunakan kacamata ini.

Dalam literatur lainnya, disebutkan juga bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan ataupun juga tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam perspektif ini, pemerintah yang dimaksud yaitu negara.⁵⁷ Sebagian ahli juga mengartikan jika kebijakan publik ini memiliki relevansi dengan suatu putusan yang diambil oleh pemerintah dan membawa dampak bagi masyarakat. Menurut Sebagian kalangan menyebutkan bahwa kebijakan publik dapat ditemukan dalam berbagaidokumen seperti regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, perundang-undangan dan lain sebagainya yang berbentuk suatu dokumen, namun sebagian kalangan yang lain juga berpendapat jika kebijakan publik menjadi suatu kerangka kerja atau tindakan, strategi bahkan juga disebut pedoman yang diputuskan sebagai *roadmap* pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Berbagai pengertian diatas dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rumusan terkait dengan isu dalam kehidupan negara yang di tindaklanjuti oleh pemerintah sebagai upaya dalam memberikan dampak baik bagi warga negaranya dalam semua aspek kehidupan. Kebijakan publik sangat diperlukan guna tercapainya cita-cita nasional sehingga dimensi kebijakan publik ini sangat luas dan menyeluruh dalam sebagian besar aspek kehidupan bernegara.²⁴

2. Ruang Publik (Jurgen Habermas)

Ruang publik adalah arena di mana individu dapat berdiskusi secara bebas

²⁴ William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm 16-25

dan rasional mengenai isu-isu penting, bebas dari tekanan negara atau pasar, untuk membentuk opini publik yang mempengaruhi keputusan politik dan sosial. Ruang ini harus inklusif, memungkinkan partisipasi semua warga tanpa diskriminasi. Media massa berperan penting dalam memfasilitasi diskusi ini, meskipun Habermas mengkritik bagaimana kekuatan ekonomi dan politik dapat mendistorsi ruang publik, mengurangi sifat kritis dan demokratisnya. Ruang publik yang sehat adalah esensial bagi demokrasi deliberatif yang berlandaskan diskusi dan konsensus rasional yang mewakili kehendak seluruh warga negara. Dengan demikian saat itu kata publik sudah dikaitkan dengan konsep masyarakat warga negara (*civil society*).²⁵

Arena di mana warga dapat berkumpul dan berdiskusi secara bebas dan rasional tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam ruang ini, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat tanpa tekanan dari pihak negara atau pasar. Habermas menekankan pentingnya keterbukaan dan inklusivitas dalam ruang publik untuk memastikan bahwa diskusi yang terjadi bersifat demokratis dan partisipatif. Namun, ia juga mengakui adanya ancaman terhadap ruang publik dari kekuatan ekonomi dan politik yang dapat mengganggu kebebasan dan kualitas diskusi. Ruang publik yang ideal, menurut Habermas, adalah dasar bagi demokrasi yang berfungsi dengan baik, di mana keputusan diambil melalui proses deliberasi yang rasional dan kolektif.²⁶

Ruang publik menjadi salah satu sarana pembangunan yang membutuhkan sebuah kebijakan publik. Ruang publik merupakan ruang dimana masyarakat

²⁵ F Budi Hardiman, *Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dan Polis sampai Cyberspace*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm.6

²⁶ Ahmad Abroni, "Refleksi Teori Kritis Jurgen Habermas atas Konsesus Simbol Perda Syariah", *Jurnal Ahkam* Vol. XXVI No.1, 2016, Hlm.75-76

memiliki akses penuh untuk melakukan kegiatan publik secara mandiri. Keberadaan ruang publik khususnya infrastruktur jalan menjadi elemen penting dalam perancangan tata ruang kota agar terlihat rapi dan indah. Dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto, pemerintah daerah kabupaten Ponorogo telah melibatkan masyarakat maupun stakeholder terkait baik dalam proses perencanaan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan.

3. Ekonomi Kerakyatan

Mubyarto mendefinisikan Ekonomi kerakyatan adalah konsep ekonomi yang menekankan pada kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat luas, terutama rakyat kecil, dengan tujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan merata. Ini melibatkan pemberdayaan melalui akses yang lebih besar terhadap sumber daya ekonomi, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), partisipasi aktif masyarakat dalam ekonomi, serta pendekatan berbasis komunitas dan keberlanjutan. Di Indonesia, konsep ini dikaitkan dengan pemikiran Bung Hatta yang menekankan koperasi dan gotong royong sebagai dasar ekonomi nasional.²⁷

Ekonomi kerakyatan adalah paradigma ekonomi yang menempatkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama, dengan memberikan perhatian khusus pada partisipasi aktif dan pemberdayaan rakyat. Konsep ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif, di mana setiap individu dan kelompok memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan sumber daya yang diperlukan. Ekonomi kerakyatan juga menyoroti peran penting usaha kecil dan menengah dalam menciptakan lapangan kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan mengurangi disparitas

²⁷ Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, hlm.42

ekonomi. Melalui pendekatan berbasis komunitas, kerjasama, dan keberlanjutan, ekonomi kerakyatan bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁸

Konsep ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari inovasi kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto disusun melalui proses gotong royong bersama elemen masyarakat. Penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan berbasis gotong royong melibatkan langkah-langkah seperti pemberdayaan usaha kecil dan menengah, pengembangan koperasi dan asosiasi ekonomi lokal, kebijakan pajak yang mendukung, pendidikan kewirausahaan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, investasi infrastruktur, dan pengembangan model bisnis berbasis komunitas. Ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat kabupaten Ponorogo merasakan langsung dampak dari adanya sebuah kebijakan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mencoba menelaah untuk menggambarkan fenomena atau kondisi yang ada dengan analisis kebijakan (*policy research*) dengan pendekatan kualitatif. Melibatkan pengumpulan data yang bersifat deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Metode-metode seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten digunakan untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan konteks sosial di balik suatu fenomena.

²⁸ Amir Mahmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : Gelora Bumi Aksara, 2016), hlm 30-31

Penelitian kualitatif sering kali digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan humaniora untuk mengeksplorasi kompleksitas realitas manusia dan memahami bagaimana individu memaknai pengalaman mereka secara subjektif.²⁹

Jenis penelitian ini dianggap relevan karena melalui penelitian kualitatif, penulis dapat mendeskripsikan secara lebih luas tentang design kebijakan bupati kabupaten Ponorogo yaitu Bapak Sugiri Sancoko dalam pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto. Penelitian kualitatif juga digunakan penulis untuk mendeskripsikan dampak kebijakan bupati setelah adanya pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto dalam perspektif ekonomi kerakyatan.

2. Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Primer

Sumber data primer dalam pendekatan kualitatif mencakup berbagai metode seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, analisis dokumen, fokus kelompok, catatan lapangan, dan karya seni atau media. Melalui wawancara mendalam, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pandangan dan pengalaman individu terkait topik penelitian, sedangkan observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan Ekonomi Kerakyatan dari dalam. Analisis dokumen memberikan akses ke informasi tertulis yang relevan. bahan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga komponen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Komponen yang pertama yaitu tempat, merupakan komponen yang menjadi lokasi penelitian berlangsung. Dalam hal ini, jalan H.O.S Cokroaminoto merupakan lokasi yang dipilih peneliti untuk mengkaji seputar design kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

²⁹ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm.8

Komponen kedua yaitu pelaku. Peneliti berupaya untuk menggali informasi dari informan yang terlibat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto. Informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan.

Penelitian mengenai Implementasi dan penerapan pembangunan Face Off Jalan H.O.S Cokroaminoto memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Staff Sub Koor Pembiayaan Pembangunan, Sosial-Ekonomi Kerakyatan Bapeda Litbang Kabupaten Ponorogo (Bapak Asa Arifudin)
2. Pimpinan Ketua Tim Face Off Jalan H.O.S Cokroaminoto dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo (Drs. Muh. Idris Septrianto, M.Pd)
3. Wakil Ketua PKL Mekar Sore (Ibu Sulis)
4. Pemilik pertokoan dan pengguna jalan di Jalan Hos Cokroaminoto
5. Masyarakat umum pengamen Modern di Jalan H.O.S Cokroaminoto (Nuris)

Informan di lapangan yang potensial untuk memberikan informasi seputar perencanaan hingga proses pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo. Komponen ketiga yaitu aktivitas. Dalam hal ini peneliti akan melihat dan mengamati sejauh mana dampak yang ditimbulkan setelah pembangunan jalan H.O.S Cokroaminoto dalam perspektif ekonomi kerakyatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian seperti buku, artikel ilmiah, laporan pemerintah, arsip, media massa, dan dokumen organisasi. Peneliti menganalisis data ini untuk mendapatkan konteks, latar belakang, dan perspektif tambahan yang mendukung pemahaman lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Data sekunder membantu melengkapi dan memperkaya temuan dari data primer dengan memberikan sudut pandang yang lebih luas dan historis. Data sekunder ini digunakan peneliti sebagai data-data penguat atau bukti-bukti pendukung tentang implementasi kebijakan Pembangunan infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahapan dalam penelitian ini sebagai berikut::

a. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan bahasan penelitian, literatur, jurnal, referensi, browsing materi lewat internet yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Observasi

Studi lapangan dalam pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diinginkan guna memperoleh data yang diharapkan. Dalam hal ini, peneliti mengamati dan mencari informasi tentang implementasi dan penerapan pembangunan *Face Off* jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo. Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek. Dalam melakukan observasi, peneliti memilih hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

c. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Peneliti menggunakan wawancara interview terstruktur, karena dengan interview terstruktur dapat dipersiapkan sedemikian rupa pertanyaan- pertanyaan yang diperlukan agar hanya fokus mengulas pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Metode ini untuk menjawab rumusan masalah dengan tujuan peneliti dapat memperoleh data tentang Pembangunan *Face Off* jalan Hos Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo.

4. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu analisis data dilakukan dengan menata dan menelaah secara sistematis semua data yang diperoleh. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menguraikan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Tahap kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik simpulan.

Analisis dilakukan dengan dipandu oleh kerangka teori Kebijakan publik, Ruang publik dan Ekonomi kerakyatan pembangunan infrastruktur jalan H.O.S Cokroaminoto Kabupaten Ponorogo pengelolaan kebijakan publik sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

a. Pengumpulan Data

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara, men-scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda

tergantung pada sumber informasi.

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan menjadi tema.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, tabel, bagan dan hubungan antar kategori.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di jalan H.O.S Cokroaminoto merupakan lokasi untuk lokasinya di pusat kota untuk mengkaji seputar design kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Menghadirkan Kawasan yang memiliki potensi pembangunan modern modal sosial dan Ekonomi Kerakyatan untuk membuat identitas baru.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan mengenai deskripsi dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya lebih lanjut dalam lima bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan, adalah bab yang didalamnya akan memaparkan latar belakang masalah, kemudian dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kerangka Teori, peneliti menjelaskan secara diskriptif teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Model analisa kebijakan, ruang publik dan ekonomi kerakyatan.

BAB III: Gambaran Umum. Penulis mendeskripsikan tentang sejarah tata pemerintahan Ponorogo, kontestasi politik dalam Pilkada Serentak 2020, serta agenda kebijakan pembangunan yang telah disusun pasca pemerintah daerah terpilih.

BAB IV: Deskripsi dan Analisis Data dari penelitian yang dilakukan peneliti. Hal ini menggambarkan bagaimana design kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto serta dampak yang terjadi setelah pembangunan jalan dalam perspektif ekonomi kerakyatan.

BAB V: Penutup, yaitu bab terakhir yang membahas kesimpulan atas jawaban dari pertanyaan penelitian yang mencakup saran, masukan, daftar pustaka dan lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kawasan kota yang dianggap sebagai sentra perekonomian, mempunyai peran penting dan besar bagi pembangunan di daerah Ponorogo. Maka dari itu penataan wilayah di kawasan Jalan H.O.S Cokroaminoto menjadi prioritas pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati H. Sugiri Sancoko, S.E., M.M dalam program 99 (Sembilan puluh Sembilan) hari sebelum pelantikan.

Desain kebijakan pembangunan menggunakan pendekatan pilihan publik untuk merealisasikan pembangunan pedestrian jalan. Implementasi kebijakan dilakukan dengan menggandeng pihak-pihak terkait seperti organisasi kemasyarakatan, para *stakeholder* hingga paguyuban pedagang kaki lima (PKL) Mekar Sore untuk ikut mendukung dan berpartisipasi dalam program *face off* jalan H.O.S Cokroaminoto. Hal ini menjadi target penyelesaian secara holistik agar hasil yang dicapai bisa dirasakan secara menyeluruh di setiap lapisan elemen masyarakat daerah Kabupaten Ponorogo.

Adanya *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto selain meningkatkan peluang ekonomi juga dapat memberikan kesempatan perekonomian yang baru bagi pedagang lain untuk turut berpartisipasi menjalankan roda perdagangan di area jalan H.O.S Cokroaminoto. Dampak pembangunan yang ditimbulkan setelah pembangunan *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto antara lain; (1) meningkatkan pendapatan masyarakat,; (2) penyerapan tenaga kerja, serta (3) membuka peluang usaha baru. Pembangunan Jalan H.O.S Cokroaminoto diharapkan dapat mewujudkan pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi

kreatif dengan menyasar terwujudnya pariwisata Ponorogo yang berkelanjutan, berbasis Ekonomi Kerakyatan sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pelaksana kebijakan Bappeda kabupaten Ponorogo untuk dapat melaksanakan program Tata Ruang Perkotaan Adanya *face off* Jalan H.O.S Cokroaminoto
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melihat penelitian Negara dan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan; Studi Pembangunan Jalan Hos Cokroaminoto Di Kab.Ponorogo serta mengkaji berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah secara komprehensif.
3. Kepada masyarakat Ponorogo untuk dapat memanfaatkan program pengembangan dari prospek pembangunan tata ruang perkotaan dari pemerintah agar dapat digunakan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syaukani, H.R., Afan Gaffar, dan M. Ryaas Rasjid. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Abdul Gafar Karim. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, 2003.
- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007.
- Agussalim Gadjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2007.
- Al Bary, M. Dahlan, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta: Arkola. 1995.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Cet. I, Jakarta: Chadra Pratama. 1996.
- Ali, Amar Akbar Ali. *Identitas Kota, Fenomena dan Permasalahannya*, Jurnal Ruang Volume 1 Nomor 1, 2009.
- Arfani, Riza Noer dan Ndadari. *Kota dan Globalisasi: Menuju Yogyakarta Kreatif*. Yogyakarta: Institute of International Studies Fisipol UGM, 2012.
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum (Dari Konstruksi Sampai Implementasi)*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet. I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Authenticity. *Creative City Planning Framework, a Supporting Document to the Agenda for Prosperity: Prospectus for a Great City*. 2008.

- Barker, Cris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka. 1999.
- Basundoro, Purnawan. 2001. *Industrialisasi, Perkembangan Kota, dan Respon Masyarakat : Studi Kasus Kota Ponorogo* Jurnal Humniora, Vol.XIII (2): 113-140.
- Barley, S. *Semiotics and the Study of Occupational and Organizational Cultural*. Behaviorist. Chicago: University of Chicago Press. 2003.
- Berger, Peter L. *Langit Suci: Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1991.
- Blanchini, Franco and Charles Landry. *The Creative City: Indicators of a Creative City, a Methodolgy for Asseng Urban Viabilty and Vitality*, Comedia; Working Paper, 1994.
- BN Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2007.
- Budianta, M. *Discourse of Cultural Identity in Indonesia During the 1997-1998 Monetary Crisis*. *Inter-Asia Cultural Studies*, 1:1, 109-128, 2000.
- Budiharjo, Eko, *Conservation of Cultural Heritage*, Paper in International Seminar on Urban Heritage- Fescript to Honour Prof. Dr. Inajati Andrisijanti, Depatment of Archaeology, Faculty of Cultural Sciences. Yogyakarta: UGM, 2011.
- Bungin, Burhan. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Burke J. Peter, Stets E. Jan. *Identity Theory And Social Identity Theory*. 1998.

- Castells, Manuel. *The Power of Identity The Information Age: Economy, Society and Culture: Vol. II, The Power of Identity*, Blackwell, Oxford. 2010.
- Charon, Joel M. *Symbolic Interactionism: an introduction, an interpretation, an i integration*, edisi 6. Upper Saddle River N.J. Prentice Hall. 1998.
- Ciptono, Fandy. *Brand Management & Strategy*, Yogyakarta: 2008.
- Cobley & Litza Jansz. *Introducing Semiotics*. NY: Totem Books. 1999.
- Cohen Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta. 2008.
- Conservation Group. *Regeneration Through Conservation, Birmingham Conservation Strategy*, Birmingham City Council, 1999.
- Cornelis Lay, *Perjuangan Menuju Puncak*, Yogyakarta: S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, 2007.
- Creswell, J. W, *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 2005.
- Denzin, dan Yvonna S. Lincoln (eds.) *Handbook of Qualitative Research*. Terj. 2009.
- Denzin, Guba, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial*, penyunting: Agus Salim. 2001.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum (Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Indonesia 1945-1990)*, Cet. II, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.

Djoko Harmantyo, “*Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah, dan Perkembangan Wilayah di Indonesia*”, Paper Presented at Seminar Nasional PIT IGI, Denpasar-Bali, 21-23 Oktober. 2011.

Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York: Free Press. 1995.

Eriyanto. *Analisis Framing*. Yogyakarta: LKiS. 2004.

Evans, Graeme. *Strategies for Creative Cities*, London: Cities Institute, London Metropolitan University, 2006.

Faisol, Hezim. *Tradisi Pasar Bandeng di Ponorogo*, 1994.

(<http://faisolhezim1994.blogspot.com/2013/10/makalah-tradisi-pasarbandeng-di-Ponorogo.html>), diakses 20 September 2022.

Fakrulloh, Zudan Arif, *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum (Sebuah Pencarian)*, Cet. II, Jakarta: Rajawali Press. 2011

Giddens, Anthony. *The Constitution of Society*, cetakan keempat. Yogyakarta: Pedati. 2011.

Gleaser, Edward. *Triumph of The City*, London: Macmillan, 2011.

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Cet. IV, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009

Hamidah, Nur Fajriatul. *Perkembangan Rumah Toko Pada Kampung Pecinan Ponorogo Abad XIX-XX*, AVATAR E-Journal Pendidikan Sejarah, volume 3No. 3, Oktober 2015.

Hankinson, G. *The management of destination brands: Five guiding principles based on recent developments in corporate branding theory Journal of Brand Management.* vol. 14 No. 3, 2007.

Hogg, Michael A. *The Sosial Identity Prespective: Intergroup Relation, Self-Conception, and Small Group, Sall Group Research, Vol 35 No.3*(June 2004), diakses tanggal 2 september 2022.

I Wayan Arthanaya, “*Otonomi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*”, 2011.

Ichwan, Muhammad. *Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi di Kawasan Giri Sebagai Destinasi Wisata Religi, Tesis Tidak diterbitkan.* Jogjakarta: Pascasartana FIB Universitas Gadjah Mada. 2013.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Pemikiran UUD Negara Kesatuan RI*, Jakarta: The Habibie Center. 2011

Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta: Bumi Aksara. 1992

Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.

Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press. 1987

Kanisius. Susanto. *Gaya Hidup, Identitas, dan Eksistensi Masyarakat dan KeEkonomi KerakyatananSurakarta Tahun 1871-1940*, Disertasi Tidak Diterbitkan. Yogyakarta: Program Pascasarjana FIB Universitas Gadjah Mada. 2010.

Karim, Abdul Gaffar, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.

- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900: dari Emporium sampai Imperium*, Jakarta: PT. Gramedia. 1992.
- Kasdi, Aminuddin, *Babad Ponorogo: Tinjauan Historiografis dalam Studi Sejarah*. Surabaya: Jurusan Pendidikan Sejarah-IKIP, 1987.
- Kelsen, Hans. *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media. 2008.
- Kemdikbud. *Mocopatan: Asal-usul, Jenis Tembang, dan Pementasan*, (Online), (<https://belajar.kemdikbud.go.id/PetaEkonomiKerakyatan/Repositorys/mocopatan/>), dikases tanggal 22 September 2022
- Kholil, Muhammad. *Batik Damar Kurung di Ponorogo: Konsep, Unsur Bentuk dan Karakteristik*. Jurnal Pendidikan Seni Rupa. Volume 04 Nomor 01 Tahun 2016, 058-065, (Online), (<https://media.neliti.com/media/publications/250074-batik-damar-kurung-di-ponorogo-konsep-unsu-b765ff7d.pdf>), diakses tanggal 22 September 2022)
- Koeshandari, Ika Ismoerdijahwati. *Damar Kurung dari Masa ke Masa*. 2010.
- Koesnoe, Mohammad, *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Cet. I, Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- Kuswarno, Engkus. *Metode Penelitian Komunikasi: Etnografi Komunikasi*. 2008.
- Liliweri, Alo *Makna Ekonomi Kerakyatan Dalam Komunikasi Antar Ekonomi Kerakyatan* Yogyakarta: PTLkiS Pelangi Angkasa. 2007.
- Luwar, et.al. *Macapat Gaya Ponorogo*: Narasumber Bapak Mat Kauli. Sebagai Bahan Pembelajaran Tingkat SMA, SMK dan Masyarakat. Surabaya: Karunia. 2008.

Manan, Bagir, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Cet. I,
Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1994.

Mansur, Banun. *Risalah Hari jadi Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: Yayasan

Abdi

Putra Muntashimi.1997.

Mercer, Colin. *Cultural Planning for Urban Development and Creative Cities*.
2006

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja
Rosdakarya. 2007.

Mortokusumo, Widjaja. *The issue of Authencitiy in Urban Heritage Consevation In
search of Conservation Approach for The Protection of Urban Heritage*.
Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.

Moser, M. *Menciptakan Merek Kohesif yang Dilihat, Didengar, dan Diingat*,
Jakarta: Penerbit Erlangga 2006.

Mudlofar. *Babad Giri Kedaton: Kajian Sejarah Ponorogo Berdasarkan
NaskahKuno*. Tesis S2 Universitas Negeri Surabaya. 2002.

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah; Reformasi,
Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga. 2004

Muhammad, Rusjdi Ali (2000). *Politik Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Mukarrom, Ahwan. *Kebatinan Islam di Jawa Timur: Studi atas Naskah Sarupane
Barang ing Kitab Inggang Kejawen miwah Suluk miwah Kitab sarto
Barqoh ing Pura Giri Kedaton: Perspektif Sejarah KeEkonomi
Kerakyatanan*, DisertasiUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2007.

Mustakim. *Ponorogo (Sejarah Bandar Dagang & Jejak Awal islam)*. Jakarta:

CVCitraunggul Laksana. 2005.

Nordholt, Henk Schulte. *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor. 2009.

Noviadi, Andri. *Mantra Ritual Babarit: Nilai Ekonomi Kerakyatan, Struktur, Konteks*

Penuturan, Proses Penciptaan, dan Fungsi serta Peletariannya sebagai Bahan Ajar Apresiasi Sastra di SMA, 2012. (Online)(<http://www.upi.edu>) diakses pada tanggal 3 Oktober 2022).

Nurhadi. “Tata Ruang Pemukiman Giri Sebuah Hipotesa Atas Hasil Penelitian Di Giri, Ponorogo, Jawa Timur” dalam Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (REHPA) I, Cisarua, 8-13 Maret 1982. Jakarta. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, 1982.

Omar, Wardaya and Djojomartono. *The Role of Land Rights in Urban Heritage Management, The Explanatory Power of Institutional Economics Analysis in the Reconstruction of Cultural Heritage of Kotagede Yogyakarta, Indonesia's post-Earthquake*. Urban Issues in Asia, 2009.

Pemerintah Daerah Tingkat II Gesik. *Kabupaten Ponorogo sebuah Perspektif*. 1991. Peni Chalid, *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta: Kemitraan. 2005.

Polomo, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.

Prasetyo, Nocolaus Ade. *Tradisi Kirab Kebo Kyai Slamet Keraton Kasuanan*.

017.

Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Ilmu Hukum & Filsafat Hukum*.

(*Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*), Cet. IV, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar. 2011.

Pratikno, “*Mencoba Desentralisasi Sebagai Penguat Kebangsaan*” *Paper*

Presented at Seminar Nasional Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI:

Merajut Kembali Semangat Kebangsaan, Bulaksumur-Yogyakarta, 23 Juni.

2008.

Purwo Santoso, “*Amandemen Konstitusi untuk Mengelola Kebhinnekaan*

Indonesia”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 10, Nomor 3,

November, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. VI, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.

Rahmaniah, Aniek *Ekonomi Kerakyatan dan Identitas*. Sidoarjo: Dwiputra

Pustaka Jaya. 2012. Raubo, Anna. *City Branding and its Impact on City's*

Attractiveness for

External. 2012

Rasjidi, Lili dan I.B. Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cet. III,

Bandung: Mandar Maju. 2003.

Rato, Berta, Ana Roldao and Oliver Muhlhan. *A Typolgy of Creative Clities in the*

World-Lesson Learned. Lisbon; DINAMIA/ISCTE, 2009.

Razi, Syafwan. *Konstruksi Identitas Agama dan Ekonomi Kerakyatan Etnis Minangkabau*

di Daerah Perbatasan Perubahan Identitas dalam Interaksi Antar etnis di

Rao Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, dalam Masyarakat

Indonesia, Volume 39, No. 1, Juni 2013.

- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Ritzer, George. *Sociological Theory, Fifth edition*, University of Maryland. 2001.
- Rojas, Eduardo. *Urban Heritage Conservation in Latin America and the Caribbean, A Task for all Social Actors, Sustainable Development Department Technical Paper Series*. Washington DC: Inter-American Development Bank, 2002.
- Sabaryanto, Wahyu. *Kearifan Lokal Upacara Kirab Sedekah Pasrah Sendhang Suruh Desa Giri Tengah, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang*. Skripsi S1 Universitas Negeri Yogyakarta. 2012.
- Sadu Wasistiono. “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, *Jurnal Ilmu Politik*, Volume 21, Nomor 3 2010.
- Saidi, Acep Iwan. *Hermeneutika: Sebuah Cara untuk Memahami Teks*, *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 13 Tahun 7, April 2008
- Sapteno, Marthinus Johan. *Perumusan Asas-asas Substansial dan Fungsinya dalam Pembentukan Undang-Undang, Ringkasan Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. 2007.
- Saputra. *Vitality of Giri Kedaton Site as a Religious Tourism Attraction in Sidomukti Village, Kebomas Ponorogo*, *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, E-2338-1647. 2015.
- Sarundajang, Sinyo H., *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Harapan. 1997.

- Simamora, Yohanes Sogar, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2005.
- Smitch, Richard and Warfield, Katie. *The Creative City; a Matter of Values in Creative Cities, Cultural Clusters and Local Economic Development*. New Horizons in Regional Science Series Philip Cooke and Luciana Lazzeretti, 2007.
- Sobur, Alex. *Analisis Teks Media*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Steinberg, Florian. *Revitalization of Historic Inner-City Areas in Asia*. Manila: Asian Development Bank, 2008.
- Subhan, M. Hadi. *Prinsip Hukum Kepailitan di Indonesia*, Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistiyo, Agung Budi. *Memahami Paradigma Interpretivisme, Kritisisme Dan Postmodernisme Dalam Penelitian Sosial Dan Akuntansi*, (Online), (file://localhost/h:/non %20POS/Agung%20Budi%20Sulistiyo.htm, diakses tanggal 28 Oktober 2022).
- Surya. *Kirab Ekonomi Kerakyatan Hari Jadi Kabupaten Ponorogo*, 2014.
- Syam, Nur. *Islam Pesisir*. Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara. 2005.
- Susetyo, D.P.B. *Identitas Sosial Orang Jawa: Studi Deskriptif pada Mahasiswa Jawa. Psikodimensia*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata. Vol.5. No. 1 (1-16) 2006.

- Syamsuddin Haris. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah)*. Jakarta: LIPI. 2005.
- Syarif Hidayat.” *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*”, Jurnal Poelitik, Volume 1, Nomor 1, Maret, h.1-8. 2008.
- Syarif Hidayat. “*Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Transisi Menuju Demokrasi Masukan untuk UU No. 32 Tahun 2004, Paper Presented at Seminar Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*”, Jatinangor-Jawa Barat, 21 Juni. 2010.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta: Prenada Media. 2004.
- Tarrow, Sidney. *Power in Movement, Sosial Movement, Collective Action and Politics*, Cornell University. 1994.
- Tim Peneliti. *Ponorogo Dalam Perspektif Sejarah*. Ponorogo: Disparinkom Ponorogo. 2003.
- Tim Penyusun. *Sejarah Sunan Drajat dalam Jaringan Penyebaran Islam di pesisir utara jawa*, 1998.
- Turner, J.C. *Toward a Cognitive Redefinition of The Social Group*. In Tajfel, 2008.
- UN Habitat. *Trading on Culture: Planning. the 21st Century City*, 2004
- Uswatina. *Akulturası Ekonomi Kerakyatan Jawa dan Islam: Kajian Ekonomi Kerakyatan Kirab Pusaka Malam 1 Suro di Kraton Surakarta Hadiningrat Masa Pemerintahan PakuBuwono XII*. Skripsi S1 Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.

- Utomo, Danang Wahyu. *Ponorogo: Sebuah Catatan Perjalanan Sejarah Islam*(Makalah dalam iaaipusat PIA). Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur. 2011.
- Wade, C., dan Tavis, C. *Psikologi. Edisi Kesembilan*. Terjemahan Benedictine Widiasinta dan Darma Juwono. Jakarta: Erlangga. 2009.
- Wafa, Novelian Ahmad Itmamul, dkk. *Dampak Implementasi Kebijakan Face-Off Jalan HOS Cokroaminoto terhadap Interaksi Ruang Publik*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume x, No. x, Bulan 4. 2023.
- Wahyudi. *Tradisi Kolak Alam Desa Gumeno. Makalah disajikan dalam Pengajuan Warisan Ekonomi Kerakyatan Kabupaten Ponorogo*, 2016.
- Warsito Utomo. *Sistem Federal dalam Negara Kesatuan : Kasus Pengaturan Desentralisasi Otonomi*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 1, Nomor 3, November, h.1-10.1998.
- Wicoyo, Joko. *Konsep Kekuasaan Jawa dalam Kehidupan Sosial Politik Indonesia*. Jogjakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. 1991.
- Widodo, Dukut Imam. *Grissee Tempo Doeloe*. Ponorogo: Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 2004.
- Wigjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, Jakarta: ELSAM dan HUMA. 2002.
- Wihana Kirana Jaya. “*Kebijakan Desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan, Naskah Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Universitas Gadjah Mada*, 23 Desember.2010.

Wikantyoso, Respati. *Perencanaan dan Perancangan Kota Malang: Kajian Historis Kota Malang, Arsitektur Indis*, 2017. (Online), (<http://mintakat.unmer.ac.id/edisi/4>, diakses tanggal 13 Oktober 2022).



Winardi, *Dinamika Politik Hukum (Pasca Perubahan Konstitusi dan Implementasi*

Otonomi Daerah), Cet. I, Malang: Setara Press. 2008.

Yuna Farhan, “*Transfer Anggaran (Birokrasi) Daerah*”, [http://cetak.kompas.](http://cetak.kompas.com/read/2012/08/28/05051691/transfer.anggaran.birokrasi.daerah)

[com/read/2012/08/28/05051691/transfer.anggaran.birokrasi.daerah](http://cetak.kompas.com/read/2012/08/28/05051691/transfer.anggaran.birokrasi.daerah)

diunduh 20 Oktober. 2022.

